

## Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

*Muhammad Ridho Kaljannah<sup>1</sup>, Joni Devitra<sup>2</sup>*

*Pascasarjana, Magister Sistem Informasi, Universitas Dinamika Bangsa, Jambi  
Jl. Jend. Sudirman Thehok-Jambi Telp: 0741-35096 Fax : 35093  
E-mail : [napoleonalfath@gmail.com](mailto:napoleonalfath@gmail.com)<sup>1</sup>, [devitrajoni@yahoo.co.id](mailto:devitrajoni@yahoo.co.id)<sup>2</sup>*

### Abstract

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muaro Jambi is the agency used in the management of local taxes and is responsible for the implementation of the regional taxation process in Muaro Jambi Regency. In carrying out the local taxation process starting from the data collection, registration, determination to local tax processes, human resources and technology are still needed to optimize local tax revenues. For now, the taxpayer's reporting process is still being reported manually. Because the submission of reports is still manual, taxpayers must come to the office of the Muaro Jambi Regional Tax and Retribution Management Agency and fill out the form available to be calculated by the tax officer, the tax assessment must be announced. The purpose of this study is to analyze and design a local tax service information system using an object-oriented model approach using UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagrams, Class Diagrams, Activity Diagrams, and Databases. This study resulted in a solution to the problems that existed at BPPRD Muaro Jambi, namely in the form of a regional service information system design. In this designed system, it can manage taxpayer data (restaurants, hotels and parking), manage tax reporting data, manage tax reports, view taxpayer values, view taxpayer data, provide notifications to pay taxes, and as a medium of information from the Regency BPPRD. Muaro Jambi to taxpayers so that taxpayers do not need to commute to report their taxes so that taxpayers do not need to commute to report their taxes.

*Keywords:* Analysis, Design, Information Systems, Regional Taxes, BPPRD

### Abstrak

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muaro Jambi merupakan instansi yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proses perpajakan daerah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam melaksanakan proses perpajakan daerah mulai dari proses pendataan, pendaftaran, penetapan sampai dengan penagihan pajak daerah masih membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Untuk sekarang ini proses pelaporan wajib pajak masih melaporkan pajaknya secara manual. Karena penyampaian laporan yang masih manual membuat wajib pajak harus datang ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi dan mengisi form yang tersedia untuk dihitung oleh petugas pajak guna penetapan pajak yang harus dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan merancang sistem informasi layanan pajak daerah dengan menggunakan model pendekatan berorientasi objek menggunakan UML (*Unified Modeling Language*) *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Database*. Penelitian ini menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada di BPPRD Muaro Jambi, yaitu berupa rancangan sistem informasi layanan pajak daerah. Didalam sistem yang direncanakan ini dapat mengelola data wajib pajak (Restoran, Hotel dan Parkir), mengelola data Pelaporan Pajak, mengelola laporan pajak, melihat nilai ketetapan wajib pajak, melihat data wajib pajak, memberi notifikasi untuk membayar pajak, dan sebagai media penyampaian informasi dari BPPRD Kabupaten Muaro Jambi kepada wajib pajak sehingga Wajib Pajak tidak perlu pulang pergi untuk melaporkan Pajaknya sehingga Wajib Pajak tidak perlu pulang pergi untuk melaporkan Pajaknya.

*Kata kunci:* Analisis, Perancangan, Sistem Informasi, Pajak Daerah, BPPRD

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang kita rasakan sekarang ini membawa pengaruh besar, khususnya dalam dunia kerja. Salah satunya yaitu penggunaan komputer yang dapat mempermudah serta memperlancar pekerjaan. Komputer dalam dunia usaha baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah berperan sebagai hardware yang menjalankan software yang dapat dimengerti oleh pengguna. Pemanfaatan internet dalam aspek-aspek pemerintahan mendorong terwujudnya e-government, yang diharapkan dapat membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses ke informasi, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. [1]

Sistem Informasi merupakan cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses data, menyimpannya, mengelola, mengontrol dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi mencapai tujuan. [2] Sistem informasi yang baik harus memiliki sistematika yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Perkembangan teknologi menjadikan setiap lembaga pendidikan terpacu untuk mengembangkan sistem yang dimiliki saat ini kearah yang lebih sempurna sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) saat ini tidak dapat diabaikan, karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang cenderung mempengaruhi cara berpikir maupun berperilaku, khususnya pada suatu instansi atau organisasi sangat membutuhkan suatu informasi dalam pengambilan keputusan. Perkembangan TI telah memacu suatu cara baru dalam kehidupan, yaitu kehidupan yang dipengaruhi kebutuhan secara elektronik, seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-learning* dan lain-lain. Dengan perkembangan tersebut, keterlibatan TI dalam suatu instansi atau organisasi menyebabkan perubahan sistem yang berdampak pada perubahan cara kinerja. Penerapan TI telah menjadi salah satu unsur penting karena daya efektifitas dan efisiensi yang mampu mempercepat kinerja sehingga dapat mendorong keunggulan bersaing baik secara finansial maupun jaringan. Penggunaan TI saat ini telah menyebar hampir ke seluruh aspek kehidupan dan profesi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muaro Jambi merupakan instansi yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proses perpajakan daerah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak II Dadang Hidayat, SE menjelaskan bahwa dalam melaksanakan proses perpajakan daerah mulai dari proses pendataan, pendaftaran, penetapan sampai dengan penagihan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Sebagai salah satu contohnya pajak restoran untuk sekarang ini proses pelaporan wajib pajak restoran masih melaporkan pajak restorannya secara manual serta Wajib Pajak membayar pajak di Bank (Teller Bank) dan mendapatkan STSS pembayaran. Karena penyampaian laporan yang masih manual dan akan terjadi penumpukan wajib pajak di kantor BPPRD Kab. Muaro Jambi hal ini dikarenakan wajib pajak harus datang ke kantor BPPRD Kab. Muaro Jambi untuk melakukan proses layanan Pajak daerah dengan mengisi form yang tersedia untuk dihitung oleh petugas pajak guna penetapan pajak yang harus dibayarkan, apa lagi pada tanggal jatuh tempo (setiap tanggal 15 setiap bulannya) selain itu untuk wajib pajak Pajak PBB dan BPHTB kebetulan ada pada saat jam yang sama akan menambah penumpukan sehingga membuat ketidaknyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan proses layanan pajak.

Total jumlah wajib pajak yang telah melaporkan sebanyak 2151 wajib pajak, telah melaporkan 760 wajib pajak dan yang berpotensi sebanyak 946 wajib pajak di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022. Penulis melihat dari data wajib pajak potensi sangatlah besar berjumlah 946 wajib pajak potensi, jumlah wajib pajak potensi tersebut tercipta karena susahny dalam proses pendataan, pendaftaran, penetapan jika bias dimaksimalkan akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan yang relevan terkait dengan judul penelitian yang sedang diangkat mengenai “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Muaro Jambi”

Penulis merujuk kepada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hijrah Azis dan Faisal Akib (2018) dengan judul “**Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Web (Studi Kasus ; Kantor DPPKAD Kota Palopo)**”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Hijrah Azis dan Faisal Akib yaitu untuk meminimalkan terjadinya kesalahan hitung dalam pembayaran pajak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hijrah Azis dan Faisal Akib yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi bagi wajib pajak, memudahkan wajib pajak dalam proses perpajakan. [17]

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi Purnamasari (2014) dengan judul “**Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pajak BPHTB di DPPKAD Kota Tangerang Selatan**”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnamasari yaitu memfasilitasi wajib pajak dalam mencari informasi tentang Pajak BPHTB, mengurangi penumpukan berkas-berkas dengan cara output berkas SSPD dalam bentuk digital. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Purnamasari yaitu untuk memfasilitasi wajib pajak dalam mencari informasi tentang pajak daerah. [18]

Penelitian lainnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu **Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi** dilakukan oleh M .Arief Purnomo 2020. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh M .Arief Purnomo yaitu untuk memberikan solusi layanan serta dan informasi Pajak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Arief Purnomo yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat, memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan yang berbasis web. [19]

Dari beberapa Tinjauan Penelitian diatas, penelitian yang dilakukan memiliki relevansi yaitu penelitian sama-sama mengangkat topik permasalahan mengenai sistem informasi layanan publik berbasis web.

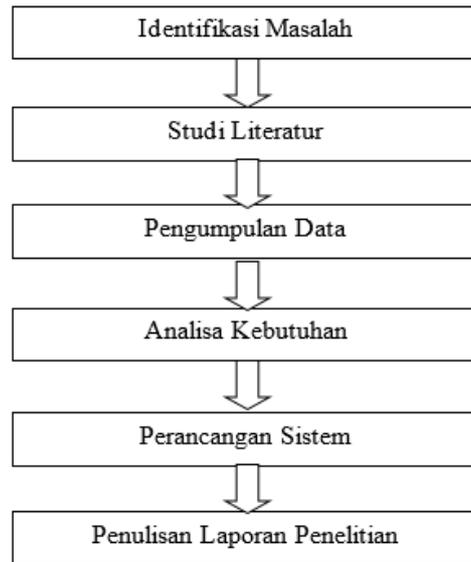
Namun demikian, penelitian yang penulis lakukan ini juga memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian tersebut di atas. Faktor pembeda dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini menghasilkan rancangan sistem informasi ketetapan pajak, besaran pajak, informasi perpajakan, aturan mengani perpajakan, layanan pengaduan pajak, konsultasi pajak khususnya wajib pajak restoran, hotel dan parkir. Dengan tujuan untuk mempermudah serta percepatan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak daerahnya dan membantu petugas BPPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Metode dalam perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan model pendekatan berorientasi objek menggunakan UML (*Unified Modeling Language*) *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Database* dan dalam perancangan tampilan menggunakan pemodelan *Prototype*.

### 3. Metodologi

#### 3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian dibutuhkan dalam proses penelitian agar menghasilkan penelitian yang baik dan sesuai dengan sasaran penelitian. Alur penelitian berisi tentang tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Alur Penelitian

### 3.2 Bahan Penelitian

Entitas, bahan, materi atau variabel yang dijadikan objek penelitian Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah pada BPPRD Kabupaten Muaro Jambi meliputi :

1. Proses-proses bisnis yang berjalan seperti data wajib pajak restoran, hotel, parkir, data admin, data *user* dan semua yang berkaitan dengan proses pelaporan pajak daerah.
2. Masalah-masalah dan kendala-kendala fungsional dan operasional dalam sistem manual yang sedang berjalan.
3. Kelayakan sistem (*systemfeasibility*) dan kriteria-kriteria kelayakan sistem informasi layanan yang akan dirancang.
4. Spesifikasi kebutuhan Sistem Informasi Layanan yang akan dirancang. Kebutuhan-kebutuhan spesifik sistem dimaksud meliputi kebutuhan masukan yang diperlukan sistem (*input*), keluaran yang harus dihasilkan (*output*), operasi-operasi yang dilakukan (proses), sumber data yang akan ditangani (data), pengendalian (kontrol) dan kebutuhan perancangan antarmuka (*interface*).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Gambaran Umum BPPRD Kab. Muaro Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muaro Jambi berdiri tahun terletak di sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Pada awal terbentuknya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang awalnya dipegang oleh pusat dan pada tahun setelah keluarnya undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor Tahun Tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari situlah pajak tersebut dipegang seutuhnya oleh daerah dengan demikian pemerintah daerah dalam bagian pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yang mana sejak tahun dipegang oleh BPPRD yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan demikian diperlukan ide-ide yang dapat menunjang pengaggalian potensi yang ada di kabupaten muaro jambi, dengan tenaga yang berpengalaman diharapkan pendapatan asli daerah terus dapat bebenah diri untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. BPPRD Muaro Jambi memiliki struktur organisasi, visi dan misi, dan strategi umum kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai berikut.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muaro Jambi memiliki Visi dan Misi, antara lain :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, berkualitas, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public.

- b. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, dan demokratis.
- d. Terwujudnya pengembangan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya serta terwujudnya penataan ruang yang memiliki daya dukung lingkungan.
- e. Optimalisasi sumber daya daerah melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
- f. Terciptanya kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 4.2 Analisis Sistem Yang Berjalan

Pada penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muaro Jambi peneliti menemukan permasalahan dalam melaksanakan proses perpajakan daerah mulai dari proses pendataan, pendaftaran, penetapan sampai dengan penagihan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Sebagai salah satu contohnya pajak restoran untuk sekarang ini proses pelaporan wajib pajak restoran masih melaporkan pajak restorannya secara manual. Karena penyampaian laporan yang masih manual membuat wajib pajak harus datang ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi dan mengisi form yang tersedia untuk dihitung oleh petugas pajak guna penetapan pajak yang harus dibayarkan.

#### 4.3 Usulan Sistem Yang Baru

Dengan adanya kelemahan-kelemahan pada menemukan permasalahan dalam melaksanakan proses perpajakan daerah mulai dari proses pendataan, pendaftaran, penetapan sampai dengan penagihan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi maka perlu sebuah sistem yang dapat memecahkan kelemahan atau permasalahan yang terjadi. Peneliti mencoba membuat alternatif pemecahan masalah dalam mengatasi kelemahan tersebut yaitu :

1. Merancang *prototype* sistem informasi layanan pajak daerah yang dapat mengelola data wajib pajak (Restoran, Hotel dan Parkir), mengelola data Pelaporan Pajak, mengelola laporan pajak, melihat nilai ketetapan wajib pajak, melihat data wajib pajak, memberi notifikasi untuk membayar pajak, dan sebagai media penyampaian informasi dari BPPRD Kabupaten Muaro Jambi kepada wajib pajak, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan melihat histori pelaporan pajaknya.
2. Merancang database dari sistem informasi layanan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Daerah Muaro Jambi.

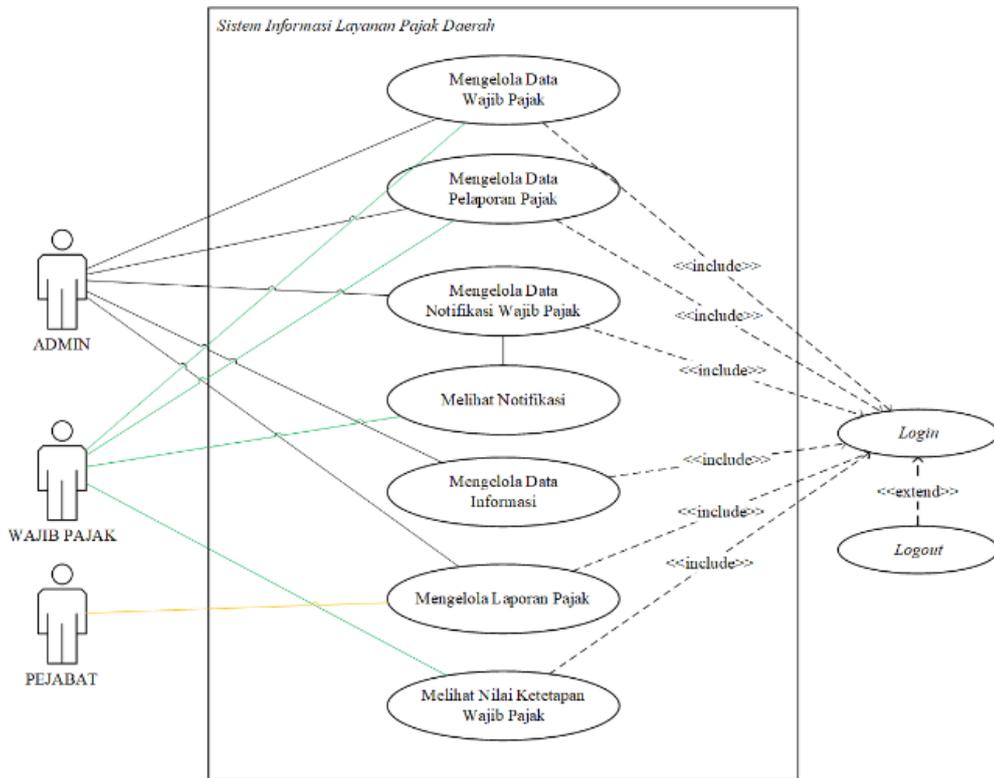
#### 4.4 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem

Kebutuhan fungsional sistem menggambarkan prosedur atau fungsi yang harus diselesaikan sistem dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna (*user*), proses atau aktivitas layanan yang disediakan oleh sistem. Dalam penelitian ini, fungsi utama yang harus dilakukan oleh sistem yang akan dirancang adalah sebagai berikut:

- a. Sistem dapat *login*.
- b. Sistem dapat mengelola (menambah, merubah, dan menghapus) data wajib pajak.
- c. Sistem dapat mengelola (menambah, merubah, dan menghapus) data pelaporan pajak.
- d. Sistem dapat mengelola (menambah, merubah, dan menghapus) data notifikasi wajib pajak.
- e. Sistem dapat mengelola (menambah, merubah, dan menghapus) informasi terkait perpajakan daerah.
- f. Sistem dapat melihat dan mencetak laporan pajak.
- g. Sistem dapat melihat nilai ketetapan wajib pajak.
- h. Sistem dapat *logout*.

#### 4.5 Perancangan Use Case Diagram

Use case diagram adalah diagram yang menjelaskan bagaimana sistem yang akan dirancang dilihat dari sudut pandang objek yang menjadi pengguna sistem. Dan menjelaskan aktivitas yang dilakukan aktor sebagai pengguna. Bentuk desain *use case diagram* ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Use Case Diagram

4.6 Deskripsi Use Case Diagram

Deskripsi use case berguna untuk memberikan informasi tentang gambaran proses use case. Berikut adalah deskripsi use case :

Deskripsi use case mengelola data pelaporan pajak ini akan menjelaskan fungsionalitas dari use case mengelola data pelaporan pajak yang dilakukan oleh aktor, seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

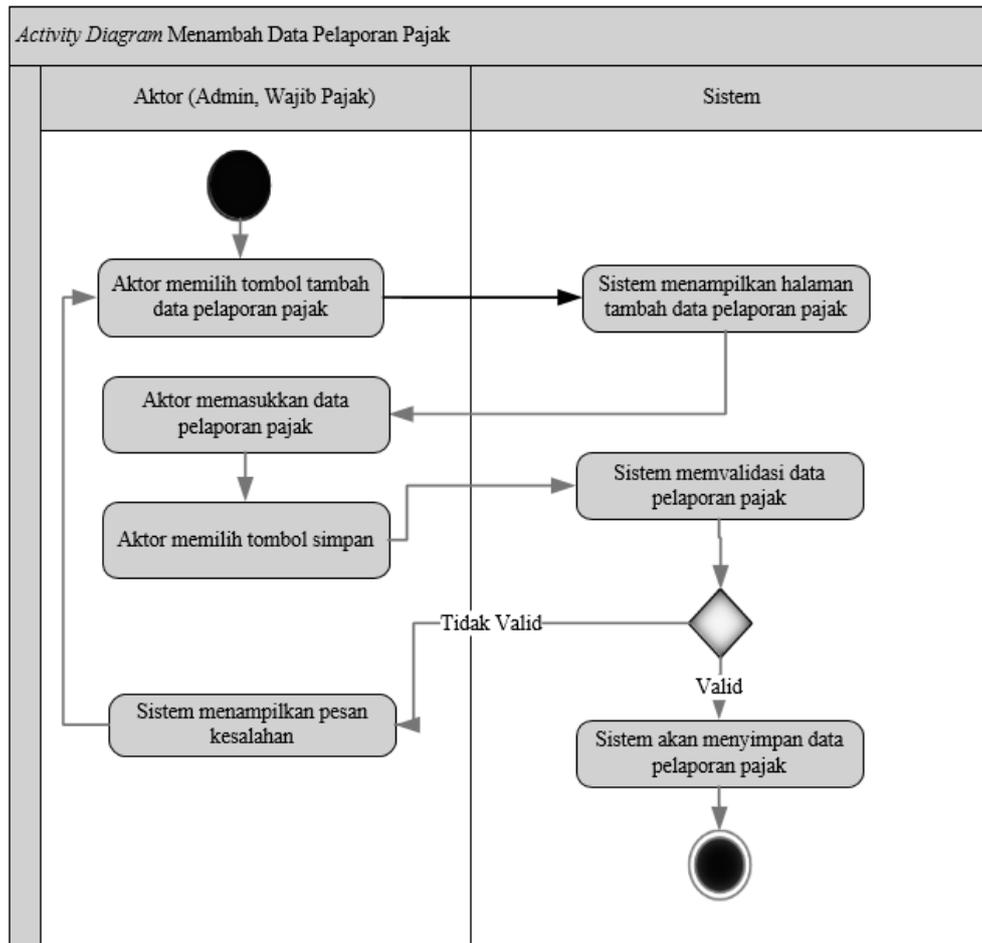
Tabel 1. Deskripsi Use Case Mengelola Data Pelaporan Pajak

<b>Nama Use Case</b>	Mengelola Data Pelaporan Pajak
<b>Aktor</b>	Admin, Wajib Pajak
<b>Deskripsi</b>	Dilakukan oleh aktor untuk menambah, merubah dan menghapus data pelaporan pajak
<b>Exception</b>	Data pelaporan pajak belum benar
<b>Pre Condition</b>	Aktor sudah dihalaman sistem layanan pajak
<b>Aktor</b>	<b>Sistem</b>
<b>Skenario Normal</b>	
1. Aktor memilih menu data pelaporan pajak	
	2. Sistem menampilkan halaman data pelaporan pajak
3. - Aktor memilih tambah data pelaporan pajak, maka S-1 berlaku - Aktor memilih merubah data pelaporan pajak, maka S-2 berlaku - Aktor memilih hapus data pelaporan pajak, maka S-3 berlaku	
<b>Sub Skenario</b>	
<b>S-1 : Menambah</b>	
1. Aktor memilih tombol tambah data	

pelaporan pajak	
	2. Sistem menampilkan halaman tambah data pelaporan pajak
3. Aktor memasukkan data pelaporan pajak	
4. Aktor memilih tombol simpan	
	5. Sistem memvalidasi data pelaporan pajak
	6. Sistem akan menyimpan data pelaporan pajak
<b>S-2 : Merubah</b>	
1. Aktor memilih data pelaporan pajak yang akan dirubah dan menekan tombol ubah	
	2. Sistem menampilkan halaman dan data pelaporan pajak yang akan di ubah
3. Aktor mengubah data pelaporan pajak dan memilih tombol simpan	
	4. Sistem memvalidasi data pelaporan pajak
	5. Sistem akan menyimpan perubahan data pelaporan pajak
<b>S-3 : Menghapus</b>	
1. Aktor memilih salah satu data pelaporan pajak dan menekan tombol hapus	
	2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi data pelaporan pajak yang akan dihapus
3. Aktor Memilih tombol hapus	
	4. Sistem akan menghapus data pelaporan pajak
<b>Skenario Alternatif</b>	
	<b>S-1 5a</b> Sistem menampilkan pesan data tidak lengkap
<b>S-1 5b</b> Aktor memasukkan ulang data yang tidak lengkap	
	<b>S-1 4a</b> Sistem menampilkan pesan data tidak lengkap
<b>S-1 4b</b> Aktor memasukkan ulang data yang tidak lengkap	
<b>S-3 3a</b> Aktor memilih tombol <i>cancel</i>	
	<b>S-3 3b</b> Sistem menampilkan data pelaporan pajak
<b>Post Condition</b>	Aktor berhasil menambah, merubah dan menghapus data pelaporan pajak

#### 4.7 Perancangan Activity Diagram

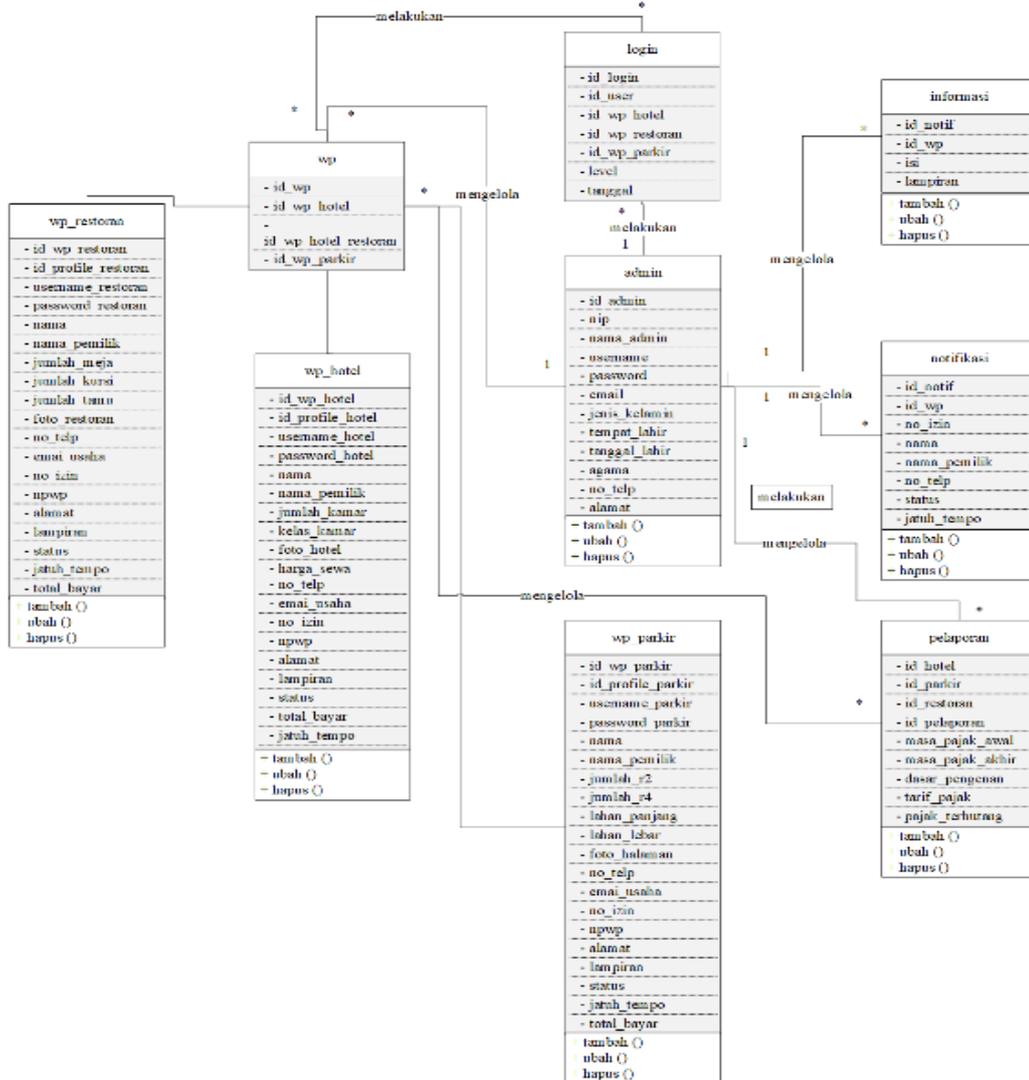
Diagram aktivitas pengelolaan data pelaporan pajak pada Gambar 3 menjelaskan bagaimana aktor menambahkan data pelaporan pajak sesuai dengan deskripsi *use case*.



Gambar 3. Tambah Data Pelaporan Pajak

#### 4.8 Perancangan Class Diagram

*Class diagram* adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan kelas dan hubungan antar kelas yang ada pada *Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muaro Jambi* yang akan dirancang. Berikut ini adalah bentuk *class diagram* pada perancangan sistem ini:



Gambar 4. Class Diagram

5. Kesimpulan

5.1 Simpulan

Setelah melalui banyak tahapan dalam Perancangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muaro Jambi dimulai dari identifikasi masalah sampai dengan perancangan *prototype* maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Sistem informasi Layanan Pajak daerah saat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi dalam pelaporan wajib pajak masih melaporkan pajak secara manual. Karena penyampaian laporan yang masih manual membuat wajib pajak harus datang ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi dan mengisi form yang tersedia untuk dihitung oleh petugas pajak guna penetapan pajak yang harus dibayarkan.
2. Sistem informasi di rancang menggunakan alat bantu UML (*Unified Modelling Language*) dalam bentuk *use case diagram* untuk menggambarkan berbagai fungsi dari sistem, *class diagram* untuk mengetahui *class* yang terbentuk, serta hubungan antar *class* tersebut. *Activity Diagram* menggambarkan alur aktifitas dalam sistem. Untuk *prototype* di rancang menggunakan aplikasi balsamiq mockup.
3. Penelitian ini menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi, yaitu berupa rancangan sistem informasi layanan pajak daerah. Didalam sistem yang direancang ini dapat mengelola data wajib pajak (Restoran, Hotel dan Parkir), mengelola data Pelaporan Pajak, mengelola laporan pajak, melihat nilai ketetapan

wajib pajak, melihat data wajib pajak, memberi notifikasi untuk membayar pajak, dan sebagai media penyampian informasi dari BPPRD Kabupaten Muaro Jambi kepada wajib pajak sehingga Wajib Pajak tidak perlu pulang pergi untuk melaporkan Pajaknya.

### 5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang bertujuan untuk mengembangkan *prototype* Perancangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muaro Jambi sebagai berikut:

1. *Prototype* sistem informasi layanan pajak daerah ini perlu dibangun serta mencakup semua perpajakan yang ada sehingga benar-benar bisa memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dan meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Daerah Muaro Jambi.
2. Bagi mahasiswa dan pembaca yang membaca tesis ini, agar dapat menjadikan tesis ini sebagai pedoman untuk membuat laporan karya ilmiahnya dan atau mengembangkan menjadi lebih sempurna lagi, khususnya yang berkaitan dengan tesis ini.

## 6. Daftar Rujukan

- [1] Anonim. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik*
- [2] Anonim. 2003. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No. 63 tahun 2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*
- [3] Anonim. 2009. *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- [4] Anonim. 2011. *Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*
- [5] Anonim. 2019. *Peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pajak Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi*
- [6] Anonim. 2012. *Peraturan Daerah No 01 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel*
- [7] Anonim. 2012. *Peraturan Daerah No 02 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran*
- [8] Anonim. 2016. *Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir*
- [9] Aziz, Hijrah dan Akib, Faisal. 2018. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Web (Studi Kasus ; Kantor DPPKAD Kota Palopo*. Palopo
- [10] Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley, dan Roth, Roberta M. 2010, 2012. *Systems Analysis And Design With UML*. New Jersey : Person Education Inc.
- [11] Hutahean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta : Budi Utama
- [12] Ibrahim, Wahyu Hidayat dan Maita Idria. 2017. *Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar*. Riau : Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi
- [13] Laudon, C. Kenneth; Laudon, P. Jane. 2014. *Management Information Systems Managing The Digital Firm, Thirteenth edition*. Prentice Hall USA.
- [14] Pressman, Roger S. 2010. *Software Engineering : A Practitioner's Approach. Seventh Edition*. New York : McGraw-Hill.
- [15] Purnamasari, Dewi. 2014. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pajak BPHTB di DPPKAD Kota Tangerang Selatan*. Tangerang Selatan
- [16] Purnomo, Arif. 2020. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi*. Kota Jambi
- [15] Rosa, Shalahuddin. 2014. *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung : Informatika
- [16] Sandiasa, Gede dan Agustana, Putu. 2018. *Reformasi Administasi dan Birokrasi Pemerintahan Derah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah*. Bali. Jurnal Amdinistasi Publik
- [17] Whitten, Jeffrey L dan Bentley, Lonnie D. 2007. *Systems Analysis and Design Methods*. New York : McGraw-Hill.